

Strategi Berbasis Data Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lembata

Marius Masri^{*a}

^aProgram Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika & Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

*Corresponding author: marius.masri2015@gmail.com

INFO ARTIKEL

Keywords:

Poverty Reduction, Data-Based Strategy, Social Welfare, and Priority Interventions

Kata Kunci:

Penanggulangan Kemiskinan, Strategi Berbasis Data, Kesejahteraan Sosial, dan Intervensi Prioritas

ABSTRACT

Poverty alleviation is a crucial issue in regional development, particularly in Kabupaten Lembata, where socioeconomic disparities persist. This study aims to identify priority intervention areas for poverty reduction using a data-driven approach based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) of 2022. The research employs a quadrant analysis method combined with a participatory poverty assessment (PPA) to determine target districts and villages for intervention. Findings indicate that Omesuri and Buyasuri sub-districts have the highest poverty levels, requiring urgent intervention. At the village level, the study identifies several high-priority areas within each sub-district, facilitating more effective policy implementation. The research highlights the importance of using real-time data and geospatial analysis in policymaking to ensure targeted and sustainable poverty reduction programs. The findings provide a strategic framework for local governments and stakeholders to optimize resources in addressing poverty effectively.

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan merupakan isu krusial dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Lembata yang masih menghadapi kesenjangan sosial ekonomi yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuadran yang dikombinasikan dengan *Participatory Poverty Assessment* (PPA) untuk menentukan kecamatan dan desa prioritas intervensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Omesuri dan Buyasuri memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, sehingga membutuhkan intervensi segera. Pada tingkat desa, penelitian ini mengidentifikasi beberapa

desa dengan tingkat kemiskinan tinggi di setiap Kecamatan, yang akan memudahkan implementasi kebijakan yang lebih efektif. Studi ini menekankan pentingnya penggunaan data real-time dan analisis geospasial dalam pengambilan kebijakan untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini memberikan kerangka strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam menangani kemiskinan secara efektif.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial-ekonomi yang masih menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Kabupaten Lembata, sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022, sekitar 30% penduduk di Kabupaten Lembata termasuk dalam kategori rumah tangga dengan kesejahteraan terendah (Kementerian Sosial RI, 2022). Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih strategis dan berbasis data dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah tersebut.

Kemiskinan di Kabupaten Lembata memiliki karakteristik yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keterbatasan dalam memperoleh peluang ekonomi yang lebih baik (BPS, 2022). Selain itu, kondisi geografis dan topografi Kabupaten Lembata yang terdiri dari daerah pegunungan dan pesisir juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan yang tinggi (Suharto et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan berbasis data dalam menentukan wilayah prioritas untuk intervensi penanggulangan kemiskinan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, penggunaan data dalam perumusan kebijakan telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah pusat dan daerah saat ini telah menggunakan DTKS sebagai basis data utama dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial dan intervensi kesejahteraan (Febrian et al., 2022). Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan dengan metode analisis yang lebih mendalam dan berbasis bukti. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah analisis kuadran dan Participatory Poverty Assessment (PPA) untuk mengidentifikasi wilayah prioritas yang memerlukan intervensi lebih lanjut (Bank, 2018).

Penelitian sebelumnya banyak berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui modal sosial, seperti yang dikaji *Pemberdayaan*

Masyarakat Miskin Melalui Modal Sosial di Palembang (Rohima et al., 2013). Studi tersebut menekankan pentingnya peran modal sosial dalam mendukung individu untuk keluar dari kemiskinan melalui jaringan sosial, kepercayaan, dan gotong royong. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menggunakan pendekatan berbasis data secara sistematis untuk menentukan wilayah prioritas intervensi kemiskinan.

Dalam penelitian ini, pendekatan berbasis data digunakan untuk mengidentifikasi Kecamatan dan Desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Lembata. Dengan memanfaatkan data DTKS 2022 dan metode analisis kuadran, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam menentukan strategi prioritas yang lebih efektif dan berbasis bukti dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sen, 1999). Konsep ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pemberdayaan individu secara sosial tanpa adanya pendekatan data yang komprehensif.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat mengidentifikasi lokasi prioritas intervensi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang (Kuncoro, 2013). Pendekatan ini juga memungkinkan adanya evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, sehingga dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih spesifik.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan di berbagai negara. Menurut (Sen, 1999), kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses individu terhadap berbagai kebebasan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan sering dikaitkan dengan teori *vicious circle of poverty*, yang menyatakan bahwa rendahnya pendapatan menghambat investasi dalam modal manusia, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas dan mempertahankan kondisi kemiskinan (Nurkse, 2009).

Di Indonesia, kemiskinan diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Indikator ini mencakup aspek pendapatan, konsumsi, serta akses terhadap layanan dasar. Studi oleh Todaro and Smith (2020) menekankan bahwa kemiskinan struktural sering kali berakar pada kurangnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi, yang menyebabkan ketimpangan

sosial yang berkepanjangan.

Strategi Berbasis Data dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pendekatan berbasis data dalam penanggulangan kemiskinan telah menjadi strategi yang semakin penting dalam perumusan kebijakan. Menurut (Bank, 2021), penggunaan data yang akurat dan real-time dapat meningkatkan efektivitas intervensi sosial dengan memastikan bahwa sumber daya disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan salah satu instrumen utama dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Studi oleh Kementerian Sosial RI (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan DTKS dalam penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program.

Dalam konteks Kabupaten Lembata, analisis kuadran digunakan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini mempertimbangkan indikator kesejahteraan rumah tangga yang diperoleh dari DTKS, termasuk jumlah rumah tangga dalam kategori Desil 1 (10% termiskin) dan Desil 2 (20% termiskin). Dengan memanfaatkan analisis data, pemerintah daerah dapat merancang intervensi yang lebih terarah dan berbasis bukti (Bappenas, 2022).

***Participatory Poverty Assesment (PPA)* dalam Evaluasi Kemiskinan**

Selain analisis data kuantitatif, pendekatan partisipatif juga penting dalam memahami dinamika kemiskinan di tingkat lokal. *Participatory Poverty Assessment (PPA)* adalah metode yang melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi masalah dan perumusan solusi terhadap kemiskinan ((Rodriguez et al., 1995).

Di berbagai negara berkembang, PPA telah digunakan untuk melengkapi data statistik dengan wawasan kualitatif mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin (Narayan et al., 2000). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan PPA membantu meningkatkan efektivitas program sosial dengan memperhitungkan perspektif dan kebutuhan masyarakat penerima manfaat (Sumarto, 2018).

Dalam konteks Kabupaten Lembata, penerapan PPA dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor lokal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti akses terhadap infrastruktur, kondisi ekonomi, dan pola mata pencaharian. Dengan menggabungkan data kuantitatif dari DTKS dan wawasan kualitatif dari PPA, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat

Modal sosial merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut (Siisiainen, 2003), modal sosial mencakup jaringan sosial, norma kepercayaan, dan kerja sama yang dapat meningkatkan kesejahteraan kolektif. Fukuyama (2021) juga menekankan bahwa modal sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dan lebih mampu mengatasi tantangan kemiskinan (Pu et al., 2008). Dalam konteks Kabupaten Lembata, pemanfaatan modal sosial dapat menjadi strategi tambahan dalam intervensi kemiskinan, terutama dalam membangun kapasitas masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan sosial.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kecamatan dengan Jumlah Rumah Tangga dalam Desil 1 yang tinggi merupakan wilayah prioritas intervensi kemiskinan.
- H2: Desa dengan Jumlah Individu dalam kategori 30% ekonomi terendah membutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih intensif.
- H3: Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata.
- H4: Penerapan *Participatory Poverty Assessment* (PPA) dapat memberikan wawasan tambahan yang meningkatkan akurasi pemetaan kemiskinan.

.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-methods yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata. Data kuantitatif diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2022, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui *Participatory Poverty Assessment* (PPA).

Sumber Data

Data penelitian terdiri dari: 1). Data Primer: Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*, FGD) dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan kelompok rentan. 2). Data Sekunder: DTKS 2022, laporan

BPS, serta dokumen resmi dari pemerintah daerah terkait indikator sosial dan ekonomi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data meliputi: 1). Survei Kuantitatif: Menganalisis DTKS untuk menentukan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. 2). Wawancara dan FGD: Menggali informasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat. 3). Observasi Lapangan: Mengamati langsung kondisi kesejahteraan dan infrastruktur masyarakat.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Kuadran: Mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiskinan dan akses layanan dasar.
2. Participatory Poverty Assessment (PPA): Mengumpulkan wawasan masyarakat terkait faktor penyebab dan strategi adaptasi kemiskinan.
3. Statistik Deskriptif: Mengidentifikasi pola kemiskinan dan distribusi kesejahteraan di Kabupaten Lembata.

Validitas dan Reliabilitas Data

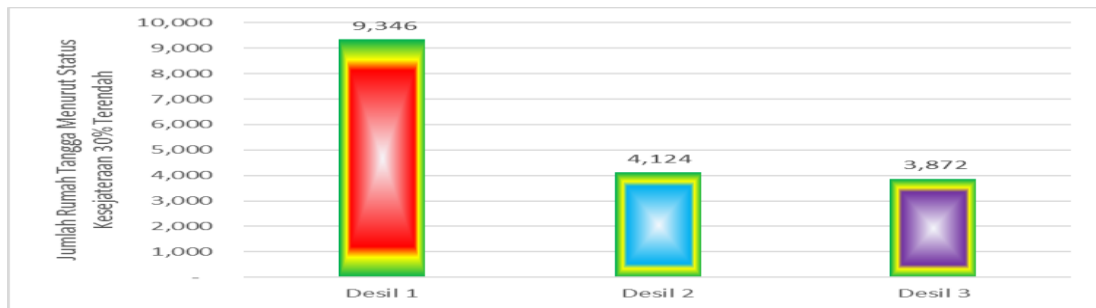
Triangulasi Data: Membandingkan sumber data primer dan sekunder untuk memastikan keakuratan. Cross-Validation: Memverifikasi hasil kuantitatif dengan temuan kualitatif. Member Checking: Mengonfirmasi hasil wawancara dengan responden.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Distribusi Rumah Tangga dan Individu Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Lembata Tahun 2022 (Semester II). Program ini difokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi masyarakat miskin. Perangkat daerah perlu mencermati indikator kemiskinan untuk memastikan efektivitas intervensi.

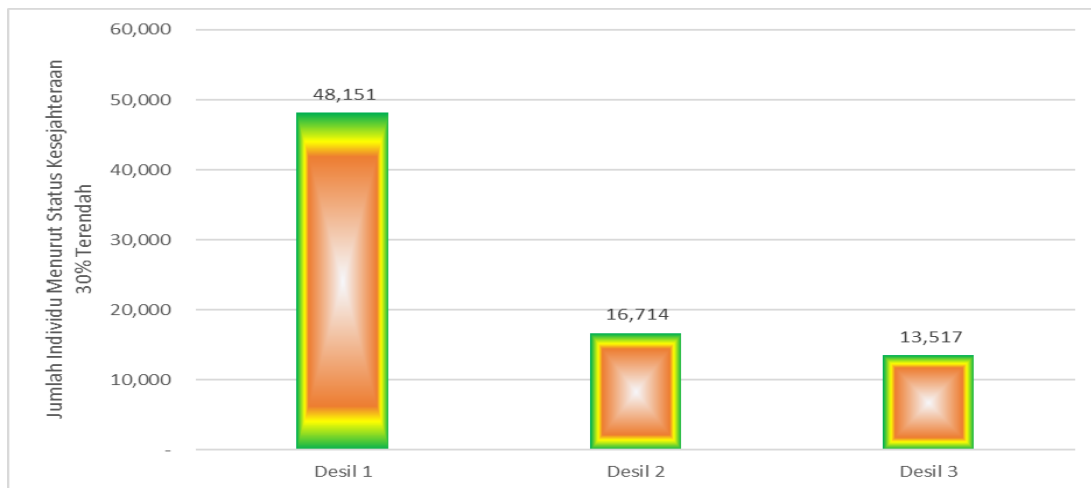
Berdasarkan data DTKS 2022 (Semester II), sebanyak 30% rumah tangga berada dalam kategori kesejahteraan terendah. Status kesejahteraan ini diukur menggunakan Desil, yaitu pengelompokan pendapatan rumah tangga dalam 10 tingkat. Desil 1 mencakup 10% rumah tangga termiskin, sementara Desil 10 mencakup 10% rumah tangga terkaya.



Gambar 1. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 30% Terendah Kabupaten Lembata

Sumber: Data DTKS 2023, Diolah

Berdasarkan data Gambar 1, terdapat 9.346 rumah tangga yang termasuk dalam Desil 1 (kelompok 10% terbawah), 4.124 rumah tangga termasuk dalam Desil 2, dan 3.872 rumah tangga termasuk dalam Desil 3. Total jumlah rumah tangga dalam 30% terendah status kesejahteraan adalah 17.342 rumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Desil adalah suatu pengelompokan yang digunakan untuk membagi populasi atau kelompok masyarakat ke dalam 10 bagian yang sama besar berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, Desil 1 merujuk pada 10% rumah tangga dengan pendapatan atau konsumsi terendah dari seluruh populasi, Desil 2 merujuk pada 10% rumah tangga berikutnya dengan tingkat pendapatan atau konsumsi sedikit lebih tinggi, dan seterusnya.



Gambar 2. Jumlah Individu Berdasarkan Status Kesejahteraan 30% Terendah Kabupaten Lembata

Sumber: Data DTKS 2023, Diolah

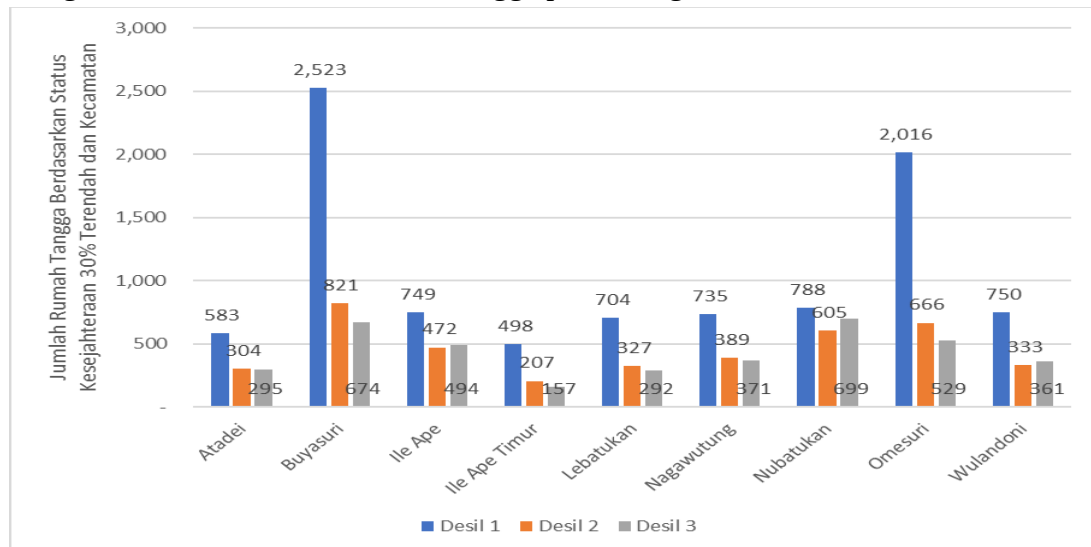
Berdasarkan data Gambar 2, terlihat bahwa jumlah individu pada kategori Desil 1 sebanyak 48,151, pada kategori Desil 2 sebanyak 16,714, dan pada kategori Desil 3 sebanyak 13,517. Jumlah total individu pada ketiga kategori Desil tersebut adalah 78,382. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 30% populasi atau individu

dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kabupaten Lembata adalah sebanyak 78,382 orang.

Distribusi Rumah Tangga dan Individu Berdasarkan Status Kesejahteraan di Setiap Kecamatan Kabupaten Lembata

Data Gambar 3 memberikan informasi mengenai jumlah rumah tangga berdasarkan status kesejahteraan pada 30% terendah di Kabupaten Lembata, yang dibagi berdasarkan kecamatan dan kategori Desil 1, Desil 2, dan Desil 3. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah rumah tangga pada kategori Desil 1 paling banyak terdapat di Kecamatan Omesuri dengan jumlah 2,016 rumah tangga, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah 498 rumah tangga. Untuk kategori Desil 2, paling banyak terdapat di Kecamatan Buyasuri dengan jumlah 821 rumah tangga, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah 207 rumah tangga. Sedangkan untuk kategori Desil 3, paling banyak terdapat di Kecamatan Nubatukan dengan jumlah 699 rumah tangga, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah 157 rumah tangga.

Jumlah rumah tangga pada ketiga kategori Desil di seluruh Kabupaten Lembata adalah 9,346 rumah tangga pada kategori Desil 1, 4,124 rumah tangga pada kategori Desil 2, dan 3,872 rumah tangga pada kategori Desil 3.

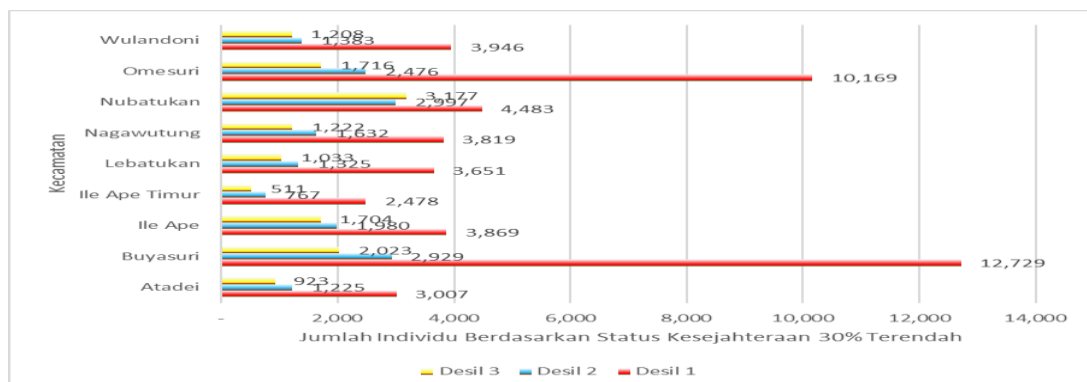


Gambar 3. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Status Kesejahteraan 30% Terendah dan Kecamatan di Kabupaten Lembata

Sumber: Data DTKS 2023, Diolah

Data yang diberikan pada Gambar 4 adalah informasi mengenai jumlah

individu berdasarkan status kesejahteraan pada 30% terendah di Kabupaten Lembata, yang dibagi berdasarkan kecamatan dan kategori Desil 1, Desil 2, dan Desil 3.



Gambar 4. Jumlah Individu Berdasarkan Status Kesejahteraan 30% Terendah dan Kecamatan di Kabupaten Lembata

Sumber: Data DTKS 2023, Diolah

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa jumlah individu pada kategori Desil 1 paling banyak terdapat di Kecamatan Omesuri dengan jumlah 10,169 individu, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah 2,478 individu. Untuk kategori Desil 2, paling banyak terdapat di Kecamatan Buyasuri dengan jumlah 2,929 individu, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Wulandoni dengan jumlah 1,383 individu. Sedangkan untuk kategori Desil 3, paling banyak terdapat di Kecamatan Nubatukan dengan jumlah 3,177 individu, sedangkan paling sedikit terdapat di Kecamatan Ile Ape Timur dengan jumlah 511 individu.

Jumlah total individu pada ketiga kategori Desil di seluruh Kabupaten Lembata adalah 48,151 individu pada kategori Desil 1, 16,714 individu pada kategori Desil 2, dan 13,517 individu pada kategori Desil 3. Data ini penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Lembata, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

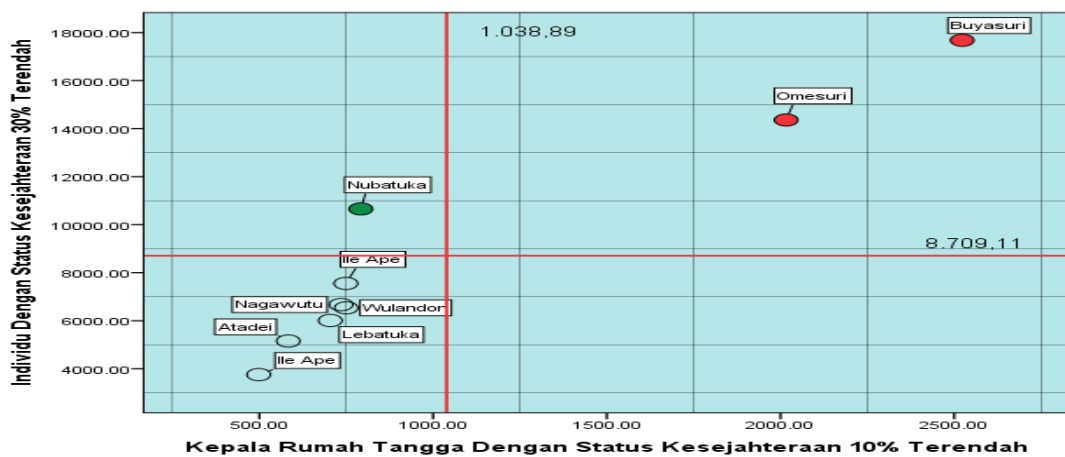
Analisis Participatory Poverty Assesment

Sesuai kebijakan Laboratorium kemiskinan, bahwa penentuan lokasi prioritas menggunakan dasar data Basis Data Terpadu (BDT) atau saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Perangkat Daerah terkait dalam memilih lokasi prioritas dari hasil kuadran perlu mempertajam melalui pendekatan laboratorium kemiskinan, pendekatan topografi wilayah, serta

dipertajam dengan PPA (*Participatory Poverty Assessment*).

Lokasi Prioritas Tingkat Kecamatan Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan analisis kuadran, kecamatan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) terdapat 2 kecamatan termasuk pada kemiskinan tinggi (merah) dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah, yaitu Kecamatan Buyasuri dan Omesuri. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan dapat dikonsentrasikan pada kecamatan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 5. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lembata
Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat kecamatan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lembata

No	Kecamatan	Indikator Utama			Indikator Pendukung		Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	Status 30%		
1	Atadel		583	5.155			4
2	Buyasuri		2.523	17.681			1

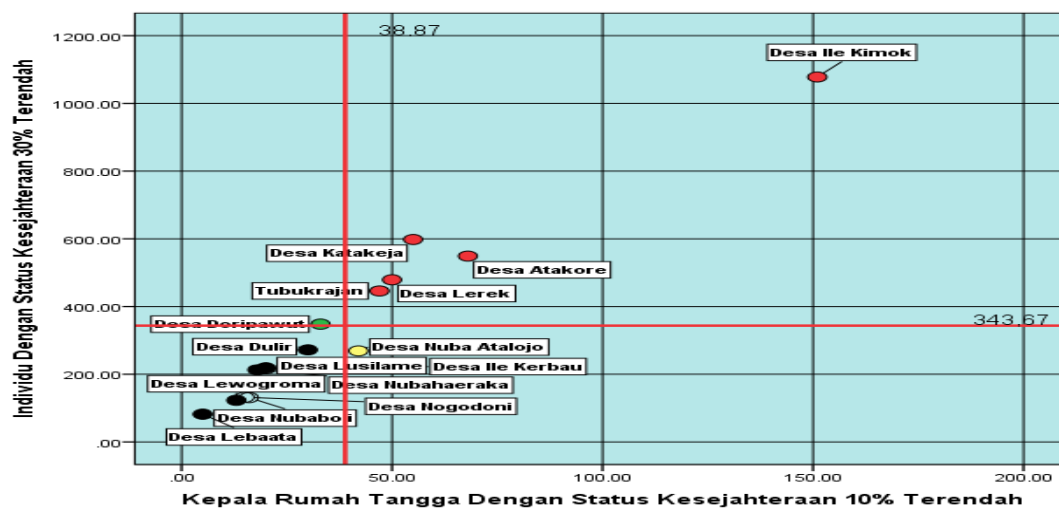
3	Ile Ape	749	7.553	4
4	Ile Ape Timur	498	3.756	4
5	Lebatukan	704	6.009	4
6	Nagawulung	735	6.673	4
7	Nubatukan	792	10.657	2
8	Ombesuri	2.016	14.361	1
9	Wulandoni	750	6.537	4

Sumber Data: Diolah, 2023

Lokasi Prioritas Tingkat Desa/Kelurahan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kecamatan Atadei

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Atadei, yaitu Kimok, Katakeja, Atakore, Lerek dan Tubukraja. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Atadei dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 6. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Aladei

Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Atadei dapat dilihat pada tabel berikut.

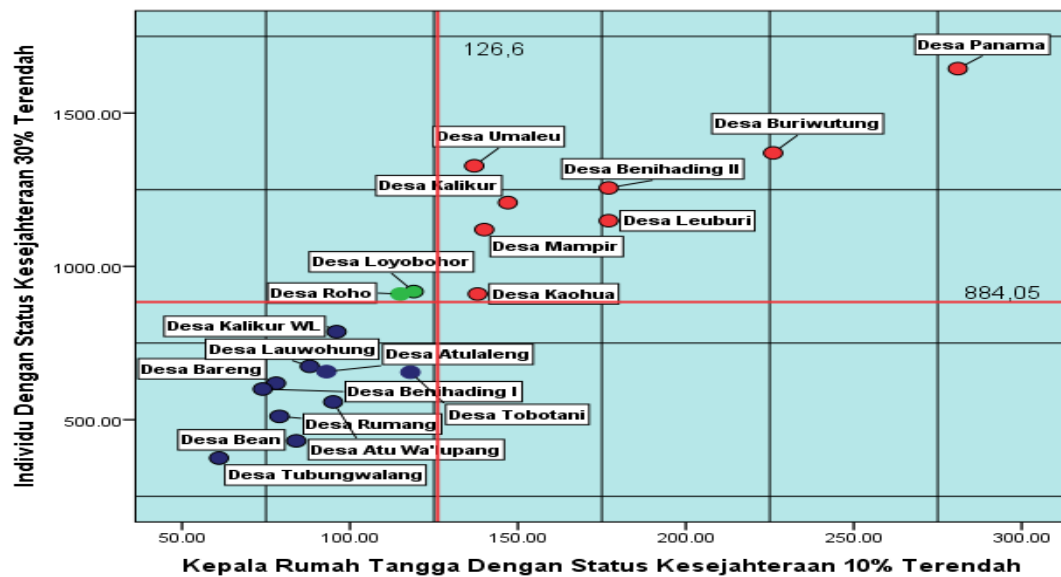
Tabel 2. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Atadei

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama		Indikator Pendukung		Prioritas
		Kepala	Rumah	Individu	Dengan	
		Tangga	Dengan	Status	Kesejahteraan	
		Status	Kesejahteraan	30% Terendah		
		10% Terendah				
1	Desa Atakore	68		549		1
2	Desa Doripawut	33		348		2
3	Desa Dulir	30		272		4
4	Desa Ile Kerbau	20		216		4
5	Desa Ile Kimok	151		1.078		1
6	Desa Katakeja	55		598		1
7	Desa Lebaata	5		82		4
8	Desa Lerek	50		479		4
9	Desa Lewogroma	13		123		4
10	Desa Lusilame	20		219		4
11	Desa Nogodoni	15		132		4
12	Desa Nuba Atalojo	42		269		4
13	Desa Nubaboli	16		131		4
14	Desa Nubahaeraka	18		213		4
15	Tubukrajan	47		446		1

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Buyasuri

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Buyasuri, ada 8 Desa yaitu Panama, Buriwutung, Umaleu, Kalikur, Benihading II, Leuburi, Mampir, dan Kaohua. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Buyasuri dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 7. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Buyasuri
Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Buyasuri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Buyasuri

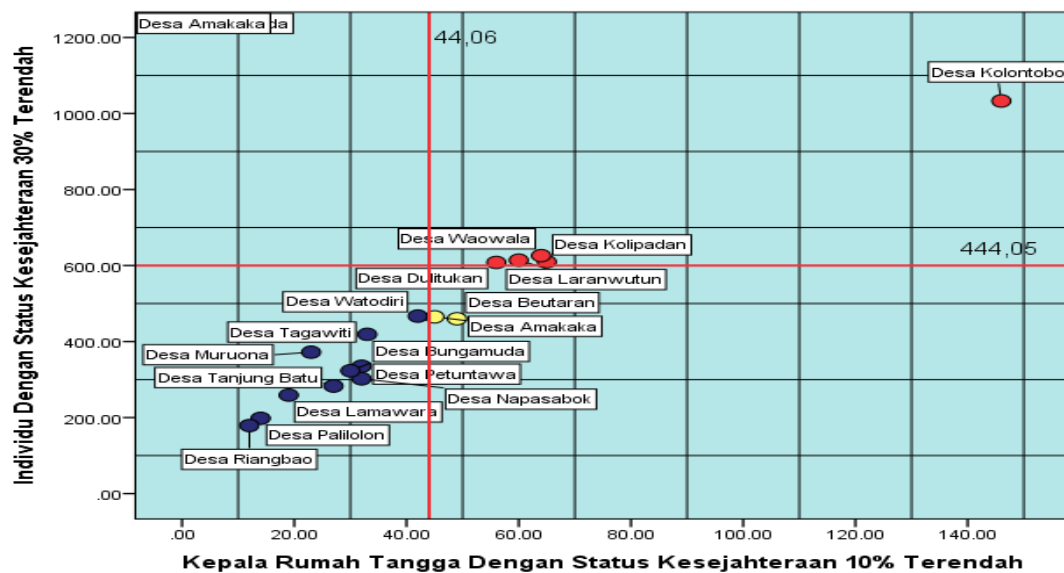
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Atu Wa'lupang	95	558	4
2	Desa Atulaleng	93	657	4
3	Desa Bareng	78	619	4
4	Desa Bean	84	431	4
5	Desa Benihading I	74	600	4
6	Desa Benihading II	177	1256	1
7	Desa Buriwutung	226	1370	1
8	Desa Kalikur	147	1208	1
9	Desa Kalikur WL	96	787	4

10	Desa Kaohua	138	910	1
11	Desa Leuburi	177	1149	1
12	Desa Lauwohung	88	674	4
13	Desa Loyobohor	119	918	2
14	Desa Mampir	140	1120	1
15	Desa Panama	281	1645	1
16	Desa Roho	115	910	2
17	Desa Rumang	79	511	4
18	Desa Tobotani	118	655	4
19	Desa Tubungwalang	61	375	4
20	Desa Umaleu	137	1328	1

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Ile Ape

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Ile Ape, ada 5 Desa yaitu Kolontobo, Dulitukan, Kolipadan, Laranwutun, dan Waowala. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Ile Ape dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 8. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Ile Ape

Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Ile Ape dapat

dilihat pada tabel berikut.

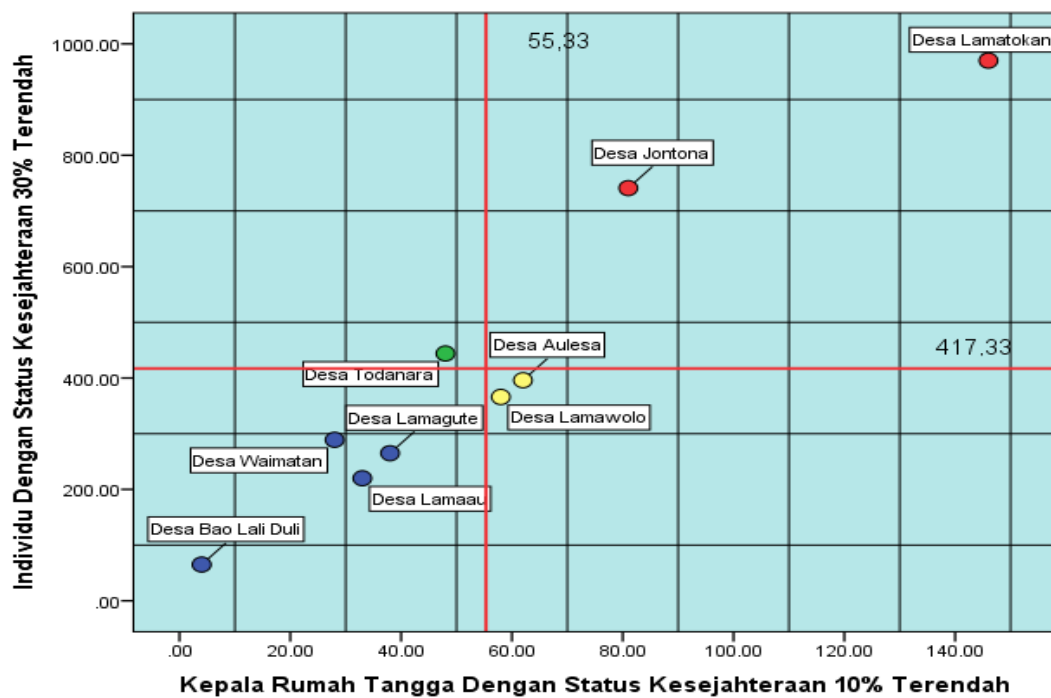
Tabel 4. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Ile Ape

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Amakaka	45	465	3
2	Desa Beutaran	49	460	3
3	Desa Bungamuda	30	323	4
4	Desa Dulitukan	56	608	1
5	Desa Kolipadan	65	610	1
6	Desa Kolotobo	146	1033	1
7	Desa Lamawara	19	259	4
8	Desa Laranwutun	60	614	1
9	Desa Muruona	23	372	4
10	Desa Napasobok	32	302	4
11	Desa Palilolon	14	198	4
12	Desa Petuntawa	32	335	4
13	Desa Riangbao	12	179	4
14	Desa Tagawiti	33	419	4
15	Desa Tanjung Batu	27	283	4
16	Desa Waowala	64	626	1
17	Desa Watodiri	42	467	4

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Ile Ape Timur

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Ile Ape Timur, ada 2 Desa yaitu Lamatoka dan Jontona. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Ile Ape Timur dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 9. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Ile Ape Timur
Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Ile Ape Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Ile Ape Timur

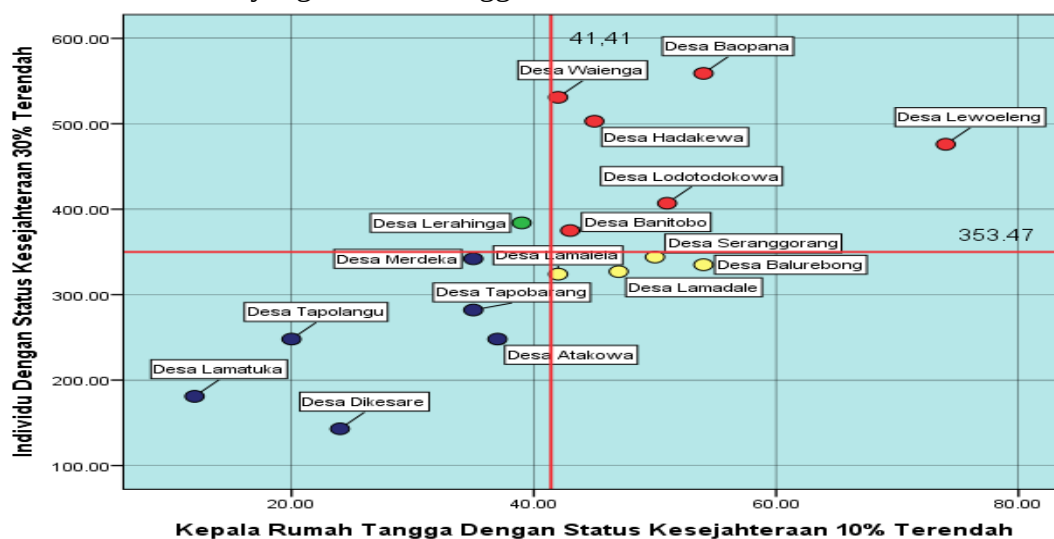
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Aulesa	62	396	3
2	Desa Bao Lali Duli	4	65	4
3	Desa Jontona	81	741	1
4	Desa Lamaau	33	220	4
5	Desa Lamagute	38	265	4
6	Desa Lamatokan	146	970	1

7	Desa Lamawolo	58	366	3
8	Desa Todanara	48	444	2
9	Desa Waimatan	28	289	4

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Lebatukan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Lebatukan, ada 6 Desa yaitu Baopana, Waienga, Lewoeleng, Hadakewa, Lodotodokowa, dan Banitobo. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Lebatukan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 10. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Lebatukan
Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Lebatukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Lebatukan

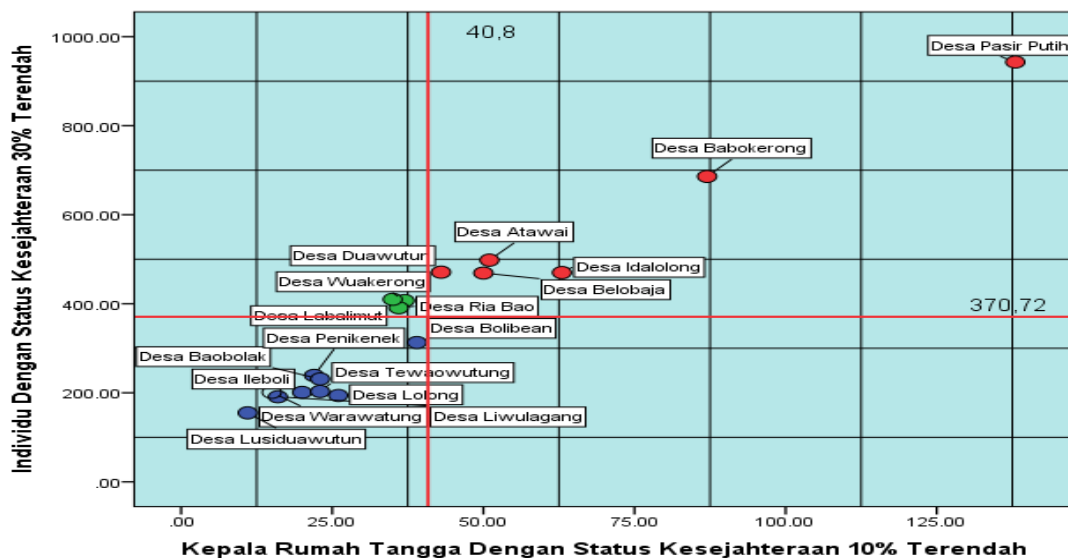
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	

1	Desa Atakowa	37	248	4
2	Desa Balurebong	54	335	3
3	Desa Banitobo	43	375	1
4	Desa Baopana	54	559	1
5	Desa Dikesare	24	143	4
6	Desa Hadakewa	45	503	1
7	Desa Lamadale	47	327	3
8	Desa Lamalela	42	324	3
9	Desa Lamatuka	12	181	4
10	Desa Lerahinga	39	384	2
11	Desa Lewoeleng	74	476	1
12	Desa Lodotodokowa	51	407	1
13	Desa Merdeka	35	342	4
14	Desa Seranggorang	50	344	3
15	Desa Tapobarang	35	282	4
16	Desa Tapolangu	20	248	4
17	Desa Walenga	42	531	1

Sumber Data: Diolah, 2023

Desa Nagawutung

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Nagawutung, ada 6 Desa yaitu Pasir Putih, Babokerong, Atawai, Idalolong, Belobaja, dan Duawutun. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Nagawutung dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 11. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Nagawutung
Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Nagawutung dapat dilihat pada tabel berikut.

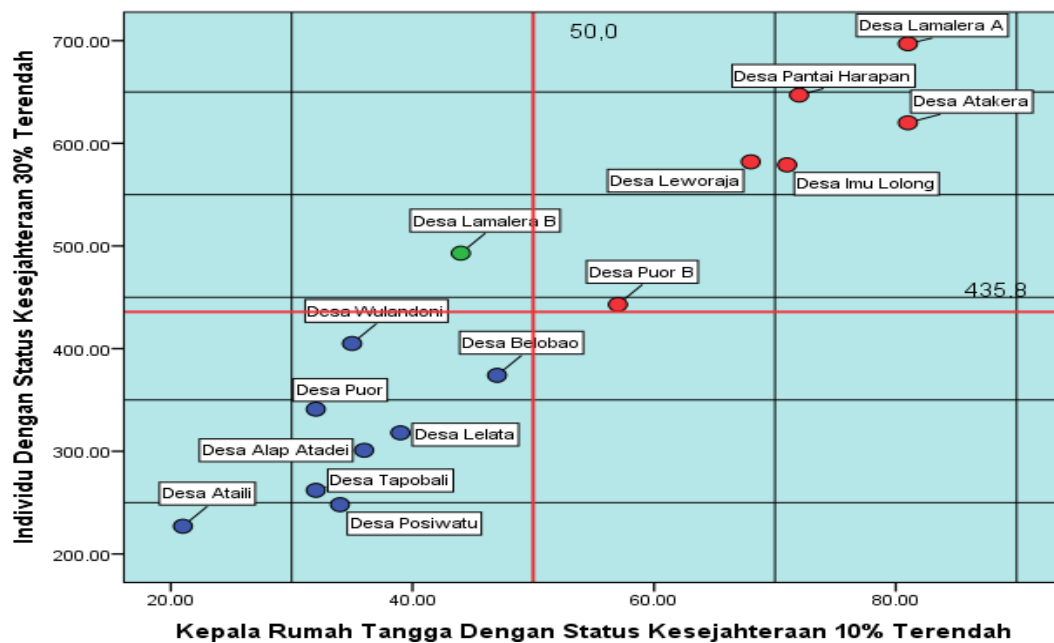
Tabel 7. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Nagawutung

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama		Indikator Pendukung		Prioritas
		Kepala Tangga Status Kesejahteraan 10% Terendah	Rumah Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	Dengan	
1	Desa Atawai	51		498		1
2	Desa Babokerong	87		686		1
3	Desa Baobalak	23		231		4
4	Desa Belobaja	50		469		1
5	Desa Bolibean	39		313		4
6	Desa Duawutun	43		471		1
7	Desa Idalolong	63		470		1
8	Desa Ileboli	20		201		4
9	Desa Labalimut	35		410		2
10	Desa Liwulagang	16		191		4
11	Desa Lolong	26		194		4
12	Desa Lusiduawutun	11		155		4
13	Desa Pasir Putih	138		943		1
14	Desa Penikenek	22		239		4
15	Desa Ria Bao	36		391		2
16	Desa Tewaowutung	23		203		4
17	Desa Warawutung	15		201		4
18	Desa Wuakerong	37		407		2

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Wulandoni

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Wulandoni, ada 6 Desa yaitu Lamalera, Pantai Harapan, Atakera, Imu Lolong, Leworaja, dan Puor B. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Wulandoni dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 12. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wulandoni

Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Wulandoni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Wulandoni

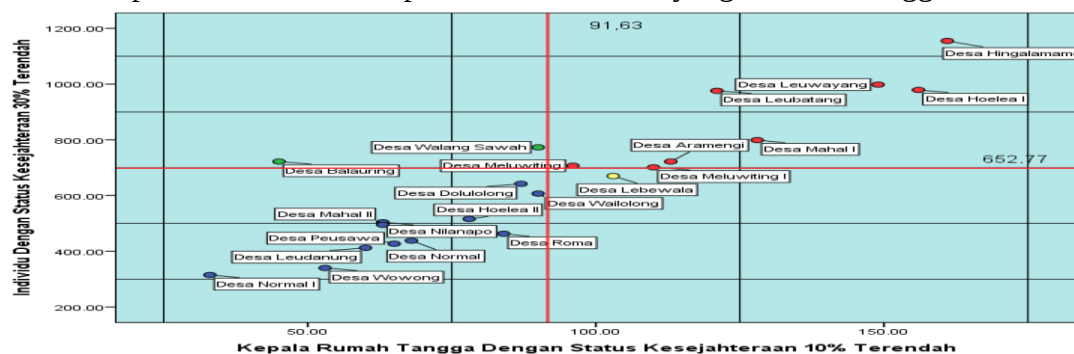
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama		Indikator Pendukung	Prioritas
		Kepala Rumah Tangga Dengan Status Kesejahteraan 10% Terendah	Tangga Status Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Alap Atadei	36		301	4
2	Desa Ataili	21		227	4
3	Desa Atakera	81		620	1
4	Desa Belobao	47		374	4
5	Desa Imu Lolong	71		579	1
6	Desa Lamalera A	81		697	1
7	Desa Lamalera B	44		493	2
8	Desa Lelata	39		318	4
9	Desa Leworaja	68		582	1

10	Desa Pantai Harapan	72	647	1
11	Desa Posiwatu	34	248	4
12	Desa Puor	32	341	4
13	Desa Puor B	57	443	1
14	Desa Tapobali	32	262	4
15	Desa Wulandoni	35	405	4

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Omesuri

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Omesuri, ada 8 Desa yaitu Hingalamamengi, Leuwayang, Hoelea I, Leubatang, Mahal I, Aramengi, Meluwiting I, dan Meluwiting. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Omesuri dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 13. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Omesuri

Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Omesuri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Omesuri

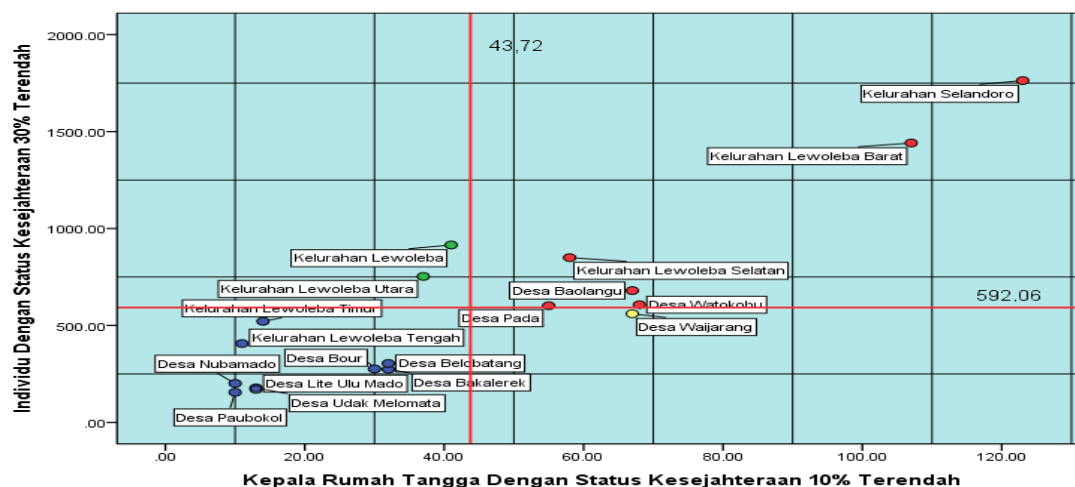
No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama		Indikator Pendukung		Prioritas
		Kepala Tangga Status Kesejahteraan 10% Terendah	Rumah Dengan Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Dengan Status Kesejahteraan 30% Terendah	Dengan Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Aramengi	113		722		1
2	Desa Balauring	45		722		2
3	Desa Dolulolong	87		642		4
4	Desa Hingalamamengi	161		1155		1
5	Desa Hoelea I	156		979		1

6	Desa Hoelea II	78	516	4
7	Desa Lebewala	103	670	3
8	Desa Leubatang	121	976	1
9	Desa Leudanung	60	412	4
10	Desa Leuwayang	149	998	1
11	Desa Mahal I	128	799	1
12	Desa Mahal II	63	495	4
13	Desa Meluwiting	96	707	4
14	Desa Meluwiting I	110	701	4
15	Desa Nilanapo	63	504	4
16	Desa Normal	68	438	4
17	Desa Normal I	33	315	4
18	Desa Peusawa	65	427	4
19	Desa Roma	84	463	4
20	Desa Wailolong	90	607	4
21	Desa Walang Sawah	90	773	2
22	Desa Wowong	53	340	4

Sumber Data: Diolah, 2023

Kecamatan Nubatukan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas penanggulangan kemiskinan (tinggi/merah) di Kecamatan Nubatukan, ada 6 Desa yaitu Kelurahan Selandoro, Kelurahan Lewoleba Barat, Kelurahan Lewoleba Selatan, Desa Baolangu, Desa Pada, dan Desa Watokobu. Dengan kondisi tersebut, penurunan kemiskinan di Kecamatan Nubatukan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk tinggi/merah.



Gambar 14. Grafik Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Nubatukan

Sumber Data: Diolah, 2023

Selengkapnya persebaran prioritas intervensi wilayah tingkat desa/kelurahan dari sisi jumlah rumah tangga menurut status kesejahteraan 10% terendah dan individu menurut status kesejahteraan 30% terendah di Kecamatan Nubatukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Prioritas Intervensi Wilayah Tingkat Desa/Kelurahan Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan Nubatukan

No	Desa/Kelurahan	Indikator Utama		Indikator Pendukung		Prioritas
		Kepala Tangga Status Kesejahteraan 10% Terendah	Rumah Dengan Kesejahteraan 10% Terendah	Individu Status Kesejahteraan 30% Terendah	Dengan Kesejahteraan 30% Terendah	
1	Desa Bakalerek	32		274		4
2	Desa Baolangu	67		680		1
3	Desa Belobatang	32		304		4
4	Desa Bour	30		276		4
5	Desa Lite Ulu Mado	13		170		4
6	Desa Nubamado	10		201		4
7	Desa Pada	55		602		1
8	Desa Paubokol	10		155		4
9	Desa Udak Melomata	13		178		4
10	Desa Waijarang	67		560		3
11	Desa Watokobu	68		607		1
12	Kelurahan Lewoleba	41		915		2
13	Kelurahan Lewoleba Barat	107		1441		1
14	Kelurahan Lewoleba Selatan	58		850		1
15	Kelurahan Lewoleba Tengah	11		407		4
16	Kelurahan Lewoleba Timur	14		521		4
17	Kelurahan Lewoleba Utara	37		753		2
18	Desa Selandaro	123		1763		1

Sumber Data: Diolah, 2023

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hipotesis yang telah dirumuskan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi kemiskinan di Kabupaten Lembata dengan pendekatan berbasis data menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2022 dan metode analisis kuadran serta Participatory Poverty Assessment (PPA).

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Omesuri dan Buyasuri memiliki jumlah rumah tangga miskin tertinggi, dengan jumlah rumah tangga dalam kategori kesejahteraan 30% terendah yang lebih dominan dibanding kecamatan lainnya.
2. Berdasarkan analisis kuadran, wilayah yang termasuk dalam kategori prioritas tinggi adalah kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta akses terhadap layanan dasar yang terbatas.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang paling efektif adalah kombinasi peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan optimalisasi pemanfaatan DTKS untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
4. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan berbasis data dengan pendekatan multidimensional, termasuk pelatihan keterampilan, perbaikan infrastruktur, dan integrasi data real-time untuk monitoring dan evaluasi program kemiskinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa strategi berbasis data yang dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif dapat meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lembata.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang bermanfaat, terdapat beberapa keterbatasan:

1. Keterbatasan Akses Data Real-time – Data DTKS diperbarui secara berkala, sehingga kemungkinan terdapat perubahan distribusi kemiskinan yang belum tertangkap dalam penelitian ini.
2. Kendala Geografis – Kabupaten Lembata memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan, yang membatasi akses ke beberapa wilayah saat pengumpulan data primer.
3. Responden Terbatas – Wawancara dan diskusi kelompok terarah hanya melibatkan sampel terbatas, yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin di daerah tersebut.
4. Analisis Kuantitatif yang Belum Mendalam – Beberapa variabel penting seperti dampak kebijakan sebelumnya terhadap pengurangan kemiskinan belum dianalisis secara menyeluruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang diidentifikasi, beberapa

saran yang dapat diberikan untuk penelitian dan kebijakan mendatang meliputi:

- a. Saran untuk Kebijakan Pemerintah
 1. Optimalisasi Pemanfaatan DTKS – Pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan dan validasi data DTKS secara lebih berkala agar intervensi kebijakan lebih akurat dan efektif.
 2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal – Program pelatihan keterampilan berbasis komunitas perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat miskin beralih ke sektor ekonomi yang lebih produktif.
 3. Peningkatan Infrastruktur Dasar – Penyediaan akses air bersih, perbaikan jalan, dan fasilitas pendidikan perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
 4. Integrasi Pendekatan Partisipatif dalam Kebijakan – Pemerintah dapat lebih banyak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi program kemiskinan agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
- b. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
 1. Analisis Longitudinal – Studi mendatang dapat menggunakan data dalam periode waktu yang lebih panjang untuk mengidentifikasi tren perubahan kesejahteraan masyarakat.
 2. Pendekatan Multivariat – Menggunakan metode statistik yang lebih kompleks seperti regresi panel data untuk memahami faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
 3. Integrasi dengan Data Geospasial – Pemanfaatan teknologi pemetaan geospasial dapat membantu dalam visualisasi sebaran kemiskinan dan efisiensi program intervensi di tingkat desa.
 4. Perbandingan Antar Daerah – Studi komparatif dengan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur dapat memberikan wawasan tambahan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, W. 2018. *Women, business and the law 2018*: World Bank Publications.
- Bank, W. 2021. *World Bank East Asia and Pacific Economic Update, Spring 2021: Uneven Recovery*: World Bank Publications.
- Febrian, W. D., Ardista, R., Kutoyo, M. S., Suryana, Y., Febrina, W., Kusnadi, K., . . . Libriantono, B. 2022. *Manajemen sumber daya manusia*.
- Fukuyama, F. 2021. *After the end of history: conversations with Francis Fukuyama*: Georgetown University Press.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi: Bagaimana meneliti dan menulis tesis*.

- Nurkse, R. 2009. *Ragnar Nurkse: Trade and Development* (Vol. 1): Anthem Press.
- Pu, L. L., Coleman, S. R., Cui, X., Ferguson Jr, R. E., & Vasconez, H. C. 2008. *Autologous fat grafts harvested and refined by the Coleman technique: a comparative study*. Plastic and reconstructive surgery, 122(3), 932-937.
- Rodriguez, N. M., Chambers, A., & Baker, R. T. K. 1995. *Catalytic engineering of carbon nanostructures*. Langmuir, 11(10), 3862-3866.
- Rohima, S., Suman, A., Manzilati, A., & Ashar, K. 2013. *Vicious circle analysis of poverty and entrepreneurship*. IOSR Journal of Business and Management, 7(1), 33-46.
- Sen, A. 1999. *Supersymmetric world-volume action for non-BPS D-branes*. Journal of High Energy Physics, 1999(10), 008.
- Siisiainen, M. 2003. *Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam*. International journal of contemporary sociology, 40(2), 183-204.
- Suharto, S., Junaedi, I., Muhdar, H., Firmansyah, A., & Sarana, S. 2022. *Consumer loyalty of Indonesia e-commerce SMEs: the role of social media marketing and customer satisfaction*. International Journal of Data and Network Science, 6(2), 383-390.
- Sumarto, S. 2018. *Budaya, pemahaman dan penerapannya: "Aspek sistem religi, bahasa, pengetahuan, sosial, kesenian dan teknologi"*. Jurnal Literasiologi, 1(2), 16-16.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2020. *Economic development*: Pearson UK.